

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PENDIRIAN DAN PASCA PENDIRIAN PARTAI BURUH**

Partisipasi buruh perempuan dalam pembangunan Partai Buruh erat kaitannya dengan proses pelibatan mereka saat masing-masing unsur pendiri Partai Buruh mengelola pengambilan keputusan dalam ruang-ruang dan mekanisme masing-masing organisasi. Hal ini menjadi tolak ukur, untuk melihat tingkat partisipasi buruh perempuan dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan organisasi.

#### **IV. 1. Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Pendirian Partai Buruh**

Partisipasi buruh perempuan dalam proses pendirian kembali Partai Buruh erat kaitannya dengan pola atau mekanisme yang dijalankan oleh masing-masing organisasi yang bergabung dalam Partai Buruh. Semakin demokratis suatu organisasi, maka konsep partisipasi anggota akan menjadi pola yang lekat dipraktikkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Salah satu unsur pendiri Partai Buruh yang menerapkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan untuk menghidupkan kembali Partai Buruh adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI). Dalam kongresnya, F-SPMI menjaring aspirasi dari peserta kongres termasuk peserta perempuan sehingga terjadilah pengambilan keputusan untuk berpartai atau membangun partai politik sebagai wadah perjuangan politik untuk memasukkan kader ke parlemen. Hal ini senada dengan yang disampaikan Mundiah (Mnd) berikut ini:<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara daring via zoom dengan Mundiah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI pada 26 April 2023.

“Kalau kami saat itu ada di kongres F-SPMI, bahwa kita akan memasuki ranah politik. Hal ini juga diputuskan dalam AD/ART kongres. Saya sebagai pengurus di pusat dan wilayah mengikuti hal itu.”

Senada dengan yang diungkapkan oleh Mundiah, Ika Asih menyatakan bahwa proses menjaring aspirasi terhadap buruh perempuan dilakukan secara luas dan massif untuk mengambil keputusan berpartai. Sehingga pengambilan keputusan melalui pendiskusian mendalam di basis-basis mereka.<sup>91</sup>

“Penjaringan aspirasi diputuskan dalam rapat dan diskusi-diskusi di basis, kemudian di kongres dan rapat pimpinan F-SPMI.”

Selain F-SPMI, proses pengambilan keputusan partisipatif untuk berpartai yang diikuti oleh buruh perempuan juga terjadi pada Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP-KEP) yang berafiliasi dengan KSPI. Rasti, salah satu buruh perempuan yang bekerja di area Depok menyatakan bahwa serikatnya melakukan Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengambil keputusan berpartai.<sup>92</sup>

“Ada momentum Munas ke-6 di Jawa Timur di Hotel Mercure Surabaya yang sekaligus menyepakati bahwa KEP ini merupakan salah satu pendiri partai dengan nama - Rumah Buruh Indonesia (RBI). Terlepas ada pro dan kontra dalam proses pengambilan keputusan ini, namun bagi kami buruh perempuan, kami merasa membutuhkan partai, dalam hal ini memang baiknya kembali ke rumah sendiri, yaitu Partai Buruh.”

---

<sup>91</sup> Wawancara tertulis dengan Ika Asih, Deputy Bidang Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang F-SPMI Kabupaten Bekasi, pada 6 Mei 2023.

<sup>92</sup> Wawancara daring via zoom dengan Rastingkem, Deputy Bidang Kalimantan 1 Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Bendahara DPP FSP KEP KSPI pada 29 April 2023.

Proses pelibatan buruh perempuan yang dilakukan oleh F-SPMI dan FSP KEP KSPI menurut teori Arnstein berkaitan dengan kemitraan (*partnership*) dimana bentuk partisipasi anggota serikat menggambarkan keseimbangan antara anggota dan pemegang kekuasaan dalam hal ini adalah pengurus serikat buruh. Bentuk penghargaan kepada anggota dilakukan secara penuh dengan menghimpun pendapat anggota melalui pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat atau diskusi hingga rapat pimpinan dan diputuskan dalam kongres sebagai mekanisme tertinggi dalam organisasi serikat buruh. Pengambilan keputusan benar-benar dimulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi.

Proses partisipasi atau pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi merupakan hal penting. Di sinilah letak anggota merasa dihargai dan dipertimbangkan suara-suaranya. Jika suatu keputusan diambil secara sepihak oleh pimpinan suatu organisasi dan anggota hanya mengikuti arahan dari pimpinan, maka proses demokratisasi tidak terolah dengan baik. IL, yang juga salah satu Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh menyatakan bahwa di organisasinya tidak ada proses pengambilan keputusan, tetapi ada pidato ketua umum yang menyatakan bahwa serikatnya mendukung Partai Buruh secara organisasional, dan hal ini menjadi arahan yang disampaikan kepada anggota.

“Tidak ada pengambilan keputusan, tapi dalam sambutan Musyawarah Nasional 2022, ketua umum kami menyatakan bahwa kita semua mendukung keberadaan Partai Buruh.”<sup>93</sup>

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi Arnstein, dimana posisi anggota tidak terlalu mendapat ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka hal itu masuk dalam

---

<sup>93</sup> Wawancara langsung dengan IL, salah satu Deputi Bidang pada Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Pengurus Perempuan di serikatnya pada 27 April 2023.

kategori peredaman (*placation*). Anggota tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau hanya sekedar berjanji untuk menjalankan aspirasi dari anggota namun sebenarnya tidak. Dalam hal ini buruh perempuan kurang mendapat ruang untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan.

Hal serupa disampaikan oleh Adityo Fajar Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh. Ia menyatakan bahwa masih ada masalah untuk mendorong upaya perempuan aktif dalam pengambilan keputusan, masih ada struktur patriarki, setidaknya hal itu ada utamanya berkaitan dengan kapasitas. Antara kader di nasional dengan di daerah bisa jadi berbeda dalam memahami isu kesetaraan gender, tapi basisnya bukan struktur patriarki yang dipertahankan untuk menghambat partisipasi.<sup>94</sup>

Hal lain yang perlu dicermati adalah, bahwa partisipasi buruh perempuan dalam agenda partai mendapat ruang penuh saat agenda-agenda yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya adalah agenda Hari Perempuan Internasional (*International Women's Day*) setiap tanggal 8 Maret. Agenda tahunan ini betul-betul dirancang oleh kader-kader perempuan Partai Buruh dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan. Di agenda inilah mereka mengeksplorasi detail kegiatan yang dapat melibatkan partisipasi sebanyak mungkin anggota perempuan di Partai Buruh.

Hal ini disampaikan oleh Ika Asih, Mundiah, Roza, Anie, Dian Septi, YK, Rasti, EW, dan perempuan-perempuan kader Partai Buruh yang masuk dalam kepanitiaan. Agenda Hari Perempuan Internasional tahun 2023 misalnya, Partai Buruh memfasilitasi Konferensi Perempuan Indonesia pada 7 Maret 2023 di Gedung Juang Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan aksi ke Gedung

---

<sup>94</sup> Wawancara daring melalui zoom dengan Adityo Fajar, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh pada 26 April 2023.

DPR pada 8 Maretnya. Agenda ini seluruhnya dipimpin oleh perempuan. Saat Konferensi mereka menghadirkan tokoh-tokoh perempuan lintas sektor dan lintas isu seperti Suciwati istri Almarhum Munir, Bivitri Susanti akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jacqueline dari Serikat Pekerja Bandara, Rima dari sektor Pekerja Rumahan, Lita Anggraeni dari Jala PRT, Marsini kakak buruh perempuan Marsinah, Yeni Rosa aktivis perempuan disabilitas, dan lain-lain yang kehadirannya memberikan gambaran tentang kondisi perempuan Indonesia dan bagaimana sebaiknya bersinergi membangun kekuatan. Dinamika bersinergi dengan banyak pihak ini menjadi pengalaman baik bagi kader perempuan Partai Buruh untuk membuka diri atas keberagaman.

Agenda yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh kader buruh perempuan Partai Buruh bukan hanya tahun ini saja. Saat ini, mereka aktif menyusun agenda pendidikan dan pelatihan bagi kader-kader perempuannya sebagai pembekalan untuk pencalegan. Tahun sebelumnya selain memimpin agenda Hari perempuan Internasional, mereka juga membuat agenda diskusi publik dan pemutaran film Marsinah tokoh buruh perempuan yang terbunuh di era Orde Baru. Mereka juga aktif membahas dan memberikan usulan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Dalam analisa teori Arnstein, bentuk partisipasi buruh perempuan dalam agenda perempuan di Partai Buruh adalah penerapan dari *citizen control*. Ini merupakan tingkat tertinggi dalam tangga partisipasi. Buruh perempuan mempunyai wewenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi suatu keputusan yang direncanakan secara kolektif.

Dalam kacamata feminisme memberi telaah bahwa tidak ada isu gender yang muncul dalam agenda khusus perempuan di Partai Buruh. Perempuan memperoleh ruang maksimal dengan

sumber daya yang cukup. Proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan atas kinerja dilakukan secara partisipatif substantif. Hal inilah yang seharusnya menjadi praktik baik untuk keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis lain di luar agenda khusus perempuan. Hal senada disampaikan Amalinda Savirani bahwa isu perempuan tidak tunggal, tapi lintas sektor.<sup>95</sup> Karenanya keterlibatan perempuan dalam Partai Buruh selayaknya tidak terbatas pada momentum perempuan saja.

#### **IV.2. Peran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh dalam mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Jaringan Komite Eksekutif Nasional**

Dalam Anggaran Dasar Partai Buruh menyatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu platform yang diemban oleh Partai Buruh untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan.<sup>96</sup> Hal ini menjadi acuan bagi partai untuk memberi ruang kepada perempuan sehingga perempuan dapat berdaya baik di internal partai maupun di masyarakat secara umum. Keberdayaan perempuan dalam Partai Buruh juga salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana partai memberi ruang partisipatif substantif kepada kader-kader perempuannya. Oleh karena itu, keterlibatan buruh perempuan dalam jajaran struktur pengurus Partai Buruh adalah catatan penting.

Dalam struktur Komite Eksekutif Partai Buruh terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno Komite Eksekutif.<sup>97</sup> Sebagai pemegang mandat kongres, Komite Eksekutif bertugas untuk menjalankan wewenang dan tugas sebagai eksekutif baik ke dalam dan ke luar organisasi Partai Buruh dalam pengelolaan kegiatan partai sehari-hari. Dalam struktur Komite Eksekutif inilah

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Amalinda Savirani, dosen Universitas Gajah Mada pada 28 Juli 2023 secara daring melalui Whatsapp.

<sup>96</sup> Anggaran Dasar Partai Buruh Periode 2021 – 2026, Ps. 5 ayat (10).

<sup>97</sup> Anggaran Dasar Partai Buruh Periode 2021 – 2026, Ps. 42 ayat (1).

kader-kader perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Mereka adalah kader-kader terbaik dari organisasi-organisasi pendukung Partai Buruh.

Partai Buruh mencantumkan kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam Anggaran Dasar.<sup>98</sup> Hal ini bentuk implementasi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagai partai politik, secara hukum Partai Buruh wajib tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Dorongan pemenuhan kuota ini yang kemudian menjadi acuan Partai Buruh merekrut jajaran kepengurusan di tingkat nasional.

Upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam jajaran kepengurusan Partai Buruh di level nasional itu dilakukan dengan menjaring kader perempuan dari organisasi-organisasi pendiri Partai Buruh. Pola perekrutannya pun berbeda-beda. Bagi F-SPMI, upaya menjaring kader perempuannya untuk masuk dalam jajaran kepengurusan di nasional dilakukan dengan menyelenggarakan rapat organisasi yang memutuskan memberi mandat kepada kader perempuannya.<sup>99</sup> Rapat organisasi merupakan mekanisme pengambilan keputusan, sehingga kader perempuan yang hendak ditugaskan berhak untuk mempertimbangkan dan memutuskan untuk bersedia menjadi pengurus Partai Buruh di tingkat nasional atau tidak. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dalam upaya mendorong partisipasi substantif dimana sebagai perempuan mempunyai hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Partisipasi substantif merupakan bekerjanya suatu sistem dalam Partai Buruh dimana tidak ada keputusan atau kebijakan yang diambil tanpa adanya partisipasi dan kontribusi dari perempuan baik sebagai

---

<sup>98</sup> Anggaran Dasar Partai Buruh Periode 2021 – 2026, Ps. 50.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Mundiah dan Ika Asih pada 26 April dan 6 Mei 2023.

anggota, pengurus, atau kader.<sup>100</sup> Artinya posisi perempuan betul-betul diperhitungkan sehingga selalu mendapat ruang dalam setiap pengambilan kebijakan.

Hal berbeda terjadi pada IL. Ia menerima telepon dari Sekretaris Umum (Sekum) di organisasinya dan ditawarkan untuk bersedia menjadi jajaran pengurus Partai Buruh level nasional, dan ia bersedia.<sup>101</sup> Hal yang sama terjadi pada E yang mana dirinya tidak mendapat mandat khusus dari organisasi untuk menjadi pengurus di nasional, tetapi melalui perangkat organisasi.<sup>102</sup> Artinya, tidak ada mekanisme rapat dimana IL dan E dapat mengemukakan pendapatnya secara lebih luas. Komunikasi dilakukan melalui perangkat organisasi secara informal.

Bila ditelaah lebih lanjut, pemenuhan kuota 30% perempuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Anggaran Dasar Partai Buruh penerapannya berbeda-beda, tergantung budaya yang berlaku di masing-masing organisasi. Telaah doktriner terhadap Pasal 50 Anggaran Dasar Partai Buruh bermaksud memberi ruang keikutsertaan perempuan dalam jajaran kepengurusan di nasional. Namun penerapan hukumnya tidak serta merta memberi keleluasaan kepada kader perempuan Partai Buruh untuk mengambil keputusan personal untuk menolak atau menerima, termasuk mendalami peran dan bidang kerja yang ditawarkan. Hal ini senada dengan pernyataan IL bahwa dirinya sebetulnya menerima begitu saja untuk menjabat sebagai salah satu Deputi Bidang di Partai Buruh, padahal kapasitas dirinya di serikat adalah sebagai ketua bidang

---

<sup>100</sup> Wawancara daring melalui email dengan Khamid Istakhori, Program Officer *Building and Wood Workers' International* (BWI) Regional Asia Pasifik, pada 24 Mei 2024.

<sup>101</sup> Wawancara langsung dengan IL, Deputi Bidang pada Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Pengurus Perempuan Serikat pada 27 April 2023.

<sup>102</sup> Wawancara tertulis dengan EW, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Serikat pada 24 Mei 2023.

perempuan. Ia menerima posisi itu karena menyadari bahwa partai membutuhkan bidang itu dan sebagai pengurus serikat ia bersedia ditugaskan dalam bidang apapun.

Minimnya ketersediaan ruang dan kesempatan bagi perempuan dalam pengambilan keputusan ini merupakan bentuk pengabaian partisipasi politik perempuan dan pengingkaran terhadap esensi demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Anna Margret bahwa partisipasi politik selayaknya dikembalikan pada definisi substantif, yakni keterlibatan bermakna untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Sehingga partisipasi perempuan bukan sekedar namanya ada dalam daftar kepengurusan, tetapi memastikannya sebagai sentral yang musti ada dalam setiap tingkatan.<sup>103</sup>

Dalam konteks partisipasi menurut teori Arnstein, hal ini masuk dalam kategori peredaman (*placation*) dimana warga dalam hal ini kader buruh perempuan tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, meskipun ada komunikasi yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, tetapi komunikasinya belum dalam bentuk penyediaan ruang seluas mungkin untuk mengolah ragam argumentasi.

Bila ditelaah dengan menggunakan feminisme, dapat ditarik argumentasi bahwa pengaruh relasi kuasa dalam struktur organisasi masih cukup kuat dipraktikkan oleh perangkat organisasi masing-masing. Kondisi ini juga akan berpengaruh pada keterlibatan buruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh partai. Dengan demikian, penerapan teks Pasal 50 Anggaran Dasar Partai Buruh tidak atau belum berbanding lurus dalam konteks penerapannya di lapangan.

---

<sup>103</sup> Wawancara tertulis dengan Anna Margret, Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada 29 Juli 2023

### **IV.3. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Buruh Perempuan dalam Berpartisipasi di Partai Buruh**

Berorganisasi dalam partai politik adalah langkah maju bagi buruh perempuan. Kemajuan ini adalah kemelekatan yang tak terpisahkan dengan pengalaman saat buruh perempuan berpolitik dalam bentuk serikat buruh. Pengalaman-pengalaman yang sanggup dilalui oleh buruh perempuan di serikat merupakan capaian daya lenting yang mendorong kualifikasi buruh perempuan menjadi buruh yang sadar tentang hak-haknya untuk berjuang secara kolektif. Keaktifan buruh perempuan dalam serikat buruh merupakan penanda bahwa dirinya telah menjadi pelaku pengarusutamaan gender, baik karena dirinya sendiri adalah contoh maupun dari sisi program-program perjuangan yang diusung.

Partisipasi buruh perempuan dalam Partai Buruh adalah keunikan atau bisa dikatakan sebagai penanda bahwa buruh perempuan telah memasuki dunia yang selama ini lekat dianggap sebagai dunianya laki-laki maskulin dan patriarki. Pengalaman-pengalaman buruh perempuan berpolitik adalah catatan-catatan sejarah yang dapat menjadi telaah untuk terus mengupayakan praktik-praktik pengarusutamaan gender. Kenapa demikian? Karena catatan-catatan tersebut bukan hanya dilihat secara kuantitas tetapi juga kedalaman pemikiran dan tindakan dalam dunia politik sebagai pengalaman hidup yang bisa jadi tidak mudah.

Hambatan partisipasi buruh perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di Partai Buruh misalnya diungkapkan oleh YK selaku salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Buruh. YK mencontohkan misalnya saat Rakernas Partai Buruh, dirinya dan beberapa kawan perempuan masuk dalam kepanitiaan *Organizing Committee* (OC) yang mengurus hal-hal teknis bukan hal-hal yang bersifat substantif. Padahal mustinya bisa masuk dalam kepanitiaan *Steering*

*Committee* (SC) yang mengurus substansi materi-materi pokok kegiatan.<sup>104</sup> Lebih lanjut YK menyampaikan bahwa keberadaan perempuan belum dianggap mempunyai makna karena belum memegang keputusan-keputusan strategis padahal perempuannya ada dan bisa.

“Kita belum punya makna karena belum memegang keputusan, di rapat hanya sebagai sekretaris. Ini dinamika dalam partai politik yang masih meraba-raba. Kita juga belum dilibatkan dalam penganggaran, juga belum ada dukungan keuangan maksimal yang artinya masih sedikit suara perempuan didengar dan direspon. Kecuali jika terkait isu perempuan baru ditanya. Secara umum kebijakan partai yang normatif masih sulit, belum diberi ruang maksimal, atau cuma *person-person* tertentu yang dekat dengan pimpinan dan bagi kami itu subjektif sekali.”

Terkait dengan agenda-agenda partai yang belum mendapat support dana ini selaras dengan yang disampaikan oleh EW yang menyatakan bahwa dirinya menggunakan biaya sendiri untuk terlibat dalam agenda-agenda Partai Buruh. Lebih lanjut EW menyampaikan bahwa ada dukungan dana dari organisasi tetapi hanya sebagian, jadi mengalir saja tanpa surat tugas.<sup>105</sup> Selain EW, hal serupa juga disampaikan oleh Rasti, IL, dan Mundiah yang sama-sama aktif berpartisipasi dalam kegiatan Partai Buruh dengan biaya sendiri, karena mekanismenya belum diatur secara organisasional. Mekanisme ini erat kaitannya dengan ekosistem yang perlu dibangun baik oleh organisasi pendiri maupun di level kepartaiannya. Hal ini disampaikan oleh Dian Rositawati (Tita)

---

<sup>104</sup> Wawancara langsung dengan YK, Wasekjen Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh pada 25 April 2023.

<sup>105</sup> Wawancara tertulis dengan EW, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Serikat Pekerja pada 24 Mei 2023.

bahwa posisi perempuan tidak hanya membutuhkan afirmatif dan posisi tetapi perlu juga dibangun ekosistem dalam situasi kerja.<sup>106</sup>

Kendala lain yang dihadapi oleh Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh adalah tentang beban ganda yang masih dilekatkan kepada perempuan. Ika Asih menyatakan bahwa dirinya kurang bisa terlalu aktif dalam aktivitas Partai Buruh karena masih mempunyai bayi dibawah lima tahun (balita) yang tentu saja membutuhkan perhatian dalam tumbuh kembangnya.<sup>107</sup> Selain itu, dirinya juga membagi waktu dan perhatiannya karena bertanggung jawab juga sebagai pengurus F-SPMI Cabang Kabupaten Bekasi di tengah jarak tempuh agenda yang kadang jauh. Hal yang sama juga disampaikan IL bahwa dirinya memang belum bisa aktif seperti yang lain karena keempat anaknya juga membutuhkan perhatian darinya sebagai ibu.<sup>108</sup>

Tanggung jawab kerja domestik dalam hal ini kerja perawatan adalah hal penting yang tidak bisa diabaikan. Kerja merawat anak adalah proses merawat pertumbuhan manusia yang kelak menjadi generasi penerus. Namun jika kerja perawatan tersebut masih menjadi tanggung jawab perempuan saja artinya belum ada kesetaraan gender dalam praktik, belum ada pemberdayaan perempuan yang membebaskan.<sup>109</sup> Partai Buruh musti melihat hal ini sebagai kekhususan yang musti mendapat perhatian. Kekhususan yang dimaksud adalah upaya partai dalam melihat secara holistik bahwa ada hambatan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas partai bukan karena tidak

---

<sup>106</sup> Wawancara daring melalui zoom dengan Dian Rosita (Tita), pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember sekaligus peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada 29 Juli 2023.

<sup>107</sup> Wawancara tertulis dengan Ika Asih, Deputi Bidang Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Bekasi, pada 6 Mei 2023

<sup>108</sup> Wawancara langsung dengan IL, Deputi Bidang pada Pengurus Pleno Perempuan Komite Eksekutif Partai Buruh dan Pengurus Perempuan Serikat pada 27 April 2023.

<sup>109</sup> Fatimah Fildzah Izzati, "Problem "kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan", Jurnal Perempuan Vol 24 No.2 Mei 2019, Hlm 101 – 105.

mempunyai kehendak tetapi karena budaya patriarki yang masih melekatkan kerja domestik pada perempuan. Partai Buruh selayaknya berupaya memfasilitasi adanya tempat pengasuhan anak (*day care*) bagi perempuan dalam agenda-agenda partai. Ini adalah bentuk perhatian atau perlakuan khusus agar keterlibatan perempuan dalam Partai Buruh dapat dilakukan secara maksimal. Penyediaan *day care* adalah sebagai pintu masuk (saat ini) untuk mengatasi problem minimnya partisipasi perempuan, bukan untuk meyakini bahwa kerja perawatan adalah pekerjaan perempuan.

Fakta lain terkait kendala keaktifan perempuan di Partai Buruh juga disampaikan oleh buruh perempuan Roza Febrianti. Sebagai buruh yang terikat kerja dengan perusahaan, Roza mesti pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan agenda organisasi yang membutuhkan dispensasi waktu kerja. Meskipun atasannya tergolong mudah memberikan dispensasi, tetapi jika sering dispensasi meninggalkan pekerjaan juga tidak enak.<sup>110</sup>

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial Partai Buruh, Mundiah menyatakan bahwa kurang aktifnya perempuan dalam politik juga disebabkan oleh ketidakpercayaan diri perempuan itu sendiri. Perempuan merasa belum banyak paham tentang isu politik sehingga merasa belum waktunya berpolitik. Ia mencontohkannya saat dirinya merasa kesulitan menjaring Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) perempuan di wilayahnya yaitu di daerah Banten. Beberapa perempuan yang ia ajak mencalonkan diri menjadi Caleg Partai Buruh menyatakan belum bersedia karena belum memahami politik atau merasa bahwa politik belum menjadi arenanya perempuan. Problem ketidakpercayaan diri perempuan ini berkaitan dengan kapasitas perempuan yang mesti perlu ditingkatkan. Selain itu juga ada faktor surat instruksi

---

<sup>110</sup> Wawancara tertulis via Whatsapp dengan Roza Febrianti, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI pada 29 April 2023.

organisasi, waktu rapat yang terlalu lama dan kadang berbenturan dengan agenda di basis atau kerja domestik, juga jarak yang terlalu jauh dengan dana yang mesti dikeluarkan sendiri. Meskipun hal-hal ini terkesan sebagai hal teknis, tetapi mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Partai. Pungkasnya.<sup>111</sup>

Ketidakpercayaan diri perempuan berpolitik juga disampaikan oleh Jumiyeem, menurutnya kurangnya kesadaran berpartisipasi dan memanfaatkan ruang dalam mengembangkan diri menjadi salah satu sebab kenapa perempuan kurang aktif dalam politik.<sup>112</sup> Ketidakpercayaan diri perempuan ini juga berpengaruh pada semangat mereka mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Partai perlu memfasilitasi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Terkait dengan kesulitan menjaring kader perempuan dalam proses merekrut bacaleg juga dialami oleh organisasi Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Sebagai pengurus JRMK yang mempunyai basis miskin perkotaan, Guntoro mengalami kesulitan menjaring kader perempuan untuk mencalonkan anggotanya menjadi bacaleg Partai Buruh karena alasan suami dan sulit diatasi. Beban ganda yang dialami perempuan membuat perempuan berada dalam posisi sulit berpolitik sebagaimana ungkapan berikut:<sup>113</sup>

“Perempuan mengalami hambatan di keluarga. Ada calon legislatif di JRMK yang seharusnya terlibat menjadi bacaleg, tetapi karena hambatan suaminya yang sulit diatasi

---

<sup>111</sup> Wawancara daring via zoom dengan Mundiah, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekuti Nasional FSPMI pada 26 April 2023.

<sup>112</sup> Wawancara daring melalui Whatsapp dengan Jumiyeem, Deputi Bidang Pekerja Rumah Tangga Partai Buruh pada 29 Mei 2023.

<sup>113</sup> Wawancara daring melalui Whatsapp dengan Guntoro Gugun Muhammad, Sekretaris Bidang PRT, Buruh Migran, dan Miskin Kota Partai Buruh pada 29 Mei 2023.

sehingga dia mundur. Masih ada tantangan beban ganda bagi perempuan yang ini merupakan tantangan besar.”

Dari uraian di atas, maka hambatan partisipasi perempuan untuk terlibat aktif dalam Partai Buruh tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3: hambatan partisipasi buruh perempuan

<p>Budaya patriarki</p>	<p>Budaya patriarki yang turun temurun diamini masyarakat sedikit banyak telah mempengaruhi pola yang dipraktikkan oleh Partai Buruh. Pelibatan perempuan dalam agenda Partai Buruh dalam hal-hal teknis merupakan cermin pengakuan bahwa perempuan masih dianggap berkapasitas dalam hal teknis dan belum substantif. Perempuan ter subordinasi bukan sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.</p> <p>Budaya patriarki ini juga masih menjadi penghambat perempuan Partai Buruh untuk aktif karena beban ganda perawatan masih didominasi oleh perempuan.</p> <p>Turunan dari budaya patriarki ini pula yang mengkondisikan perempuan belum mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk terlibat dalam kancah perpolitikan.</p>
<p>Problem sistem (mekanisme)</p>	<p>Pelibatan perempuan di Partai Buruh masih terhambat pada mekanisme organisasi masing-masing yang belum <i>clear</i> memposisikan penugasan kader</p>

	<p>perempuannya di Partai Buruh, sehingga masih terkendala dalam hal support pendanaan, dispensasi/intruksi.</p> <p>Buruh perempuan yang masih terikat kerja di perusahaan tidak mudah keluar dari area kerja tanpa surat dari pimpinan perusahaan. Sementara alur birokrasi mesti melalui surat dari partai yang diturunkan menjadi surat ke konfederasi, diturunkan menjadi surat ke federasi, baru ke basis. Proses ini memakan waktu sementara di sisi lain buruhnya juga mesti melakukan negosiasi dengan atasan di tempat kerja.</p>
--	--

Problem perempuan di atas merupakan isu gender yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Partai Buruh. Dalam kacamata feminis, untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, perempuan mesti mendapat ruang maksimal. Ruang partisipasi itu tidak akan ada tanpa diupayakan dengan melihat atau memeriksa lebih dalam terkait kebutuhan khusus perempuan. Ruang partisipasi antara perempuan dan laki-laki tidak bisa serta merta dinyatakan setara dengan membuka kesempatan perempuan dan laki-laki begitu saja, karena perempuan mempunyai problem berlapis. Karenanya afirmasi kebijakan layak difasilitasi Partai Buruh untuk mendorong partisipasi substantif diterapkan maksimal.

#### **IV.4. Upaya Buruh Perempuan Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Berpartisipasi di Partai Buruh**

Ragam kendala yang dihadapi buruh perempuan dalam menjalankan kinerjanya di Partai Buruh diatasi dengan ragam upaya juga. Bagi mereka, kendala akan selalu ada karena sistem patriarki masih begitu lekat dipraktikkan di masyarakat termasuk di Partai Buruh. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pembekalan dalam bentuk pendidikan kepada

kader-kader perempuannya. Mundiah menjelaskan bahwa pembekalan itu ditujukan agar kader perempuan memahami bahwa agenda partai adalah bagian dari agenda organisasi yang tak terpisahkan, sehingga bisa mendalami peran politik bagi perempuan.

Terkait dengan kendala dalam membagi konsentrasi antara kerja partai dan beban kerja domestik, para buruh perempuan berusaha memajemen waktu dan pikiran sedemikian rupa agar tetap bisa menjalankan tanggung jawab yang diembannya. Buruh perempuan yang masih terikat dengan tanggung jawabnya di serikat buruh juga berupaya memaksimalkan koordinasi dengan perangkat organisasinya, agar ada sinergitas. Jika hal ini masih merupakan inisiatif personal dari kader perempuan, akan ada kelemahan karena pola yang terbangun masih parsial-parsial. Inisiatif personal ini perlu mendapat perhatian lebih dari partai agar upaya partisipasi buruh perempuan menjadi pola dalam berpartai.